

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan populasi Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk yang cenderung tinggi. Menurut data yang tercatat dalam sensus penduduk pada tahun 2020, penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2019). Data sensus penduduk 2020 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dibanding sensus sebelumnya pada tahun 2010, berjumlah sebanyak 32,56 juta jiwa dengan rata-rata bertambah sekitar 3,26 juta tiap tahun. Pertambahan penduduk Indonesia dari 2010 hingga 2020 mencapai 1,25 persen setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2019).

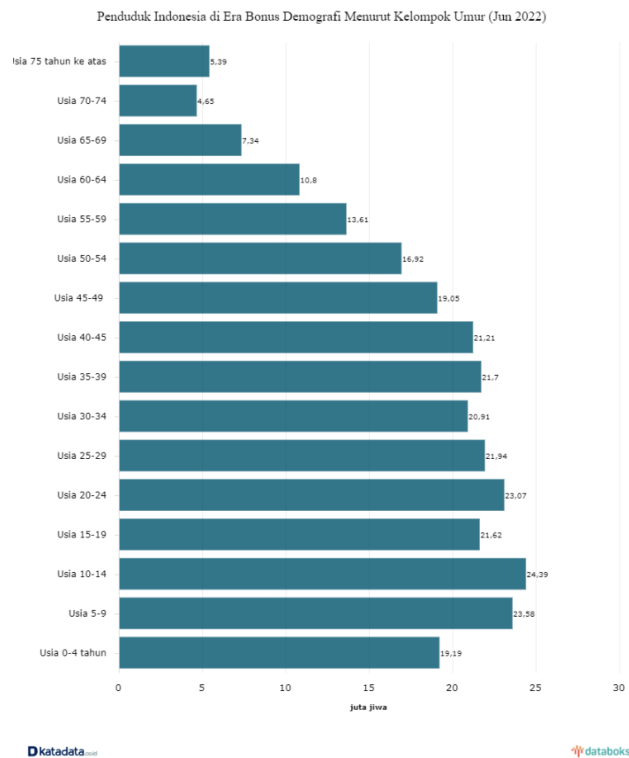
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini sangat pesat yang dapat dibuktikan dengan semakin padatnya penduduk kota/daerah serta semakin berkurangnya lahan hijau. Tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas sosial bangsa Indonesia juga meningkat setiap tahunnya. Dengan kondisi seperti ini maka Indonesia akan mengalami bonus demografi. Perlu adanya pemanfaatan dan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan karena penduduk merupakan aspek penting didalam proses pembangunan bangsa dan kesejahteraan umum (Sutikno, 2020).

Angka jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia tergolong cukup tinggi, maka diperlukan adanya pengendalian agar tercipta pemerataan kesejahteraan umum. Salah satu tujuan utama negara Indonesia termuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "memajukan kesejahteraan umum". Dengan maksud

memajukan kesejahteraan umum ini pemerintah diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan pemerintah dapat dilihat dalam mengurangi tingkat pengangguran serta menciptakan lapangan pekerjaan agar tenaga kerja atau pencari kerja dapat terserap di pasar kerja. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak, tentu menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang disebabkan oleh jumlah penduduk besar. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan jumlah angkatan kerja yang besar sehingga menyebabkan semakin banyak pula pencari kerja (Prasetyo & Khodijah, 2020). Kepadatan penduduk menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, namun kesempatan kerja yang tersedia sangat sedikit dan tidak bisa menyeimbangi jumlah penduduk yang besar. Dengan begitu, pemerintah harus memperhatikan perluasan kesempatan kerja yang dilakukan secara maksimal dengan tujuan agar masalah ketenagakerjaan di Indonesia dapat terselesaikan.

Setiap tahunnya, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perbedaan jumlah presentase usia produktif dan non-produktif semakin terlihat pada sensus penduduk di tahun 2020. Mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial (Badan Pusat Statistik, 2019). Generasi Z menyumbang sebanyak 27,94% dari jumlah populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87% dari keseluruhan total populasi Indonesia.



Gambar 1.1 Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur (Juni 2022)
Sumber : Dukcapil Kementerian Dalam Negeri

Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kusnandar, 2022), terdapat 275,36 juta orang yang tinggal di Indonesia per Juni 2022. Sebanyak 190,83 juta orang di Indonesia berada dalam usia kerja, yang mencakup 69,3% dari total populasi negara. Sedangkan sisanya sebanyak 84,53 juta jiwa merupakan usia tidak produktif atau 30,7% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Sekarang ini Indonesia sedang memasuki era demografi yang berarti penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia tidak produktif.

Tenaga kerja terdiri dari masyarakat usia kerja yang mampu melakukan pekerjaan, seseorang yang telah memiliki pekerjaan, yang sedang mencari lowongan kerja serta seseorang yang masih mengenyam pendidikan (Alfiani & Nawawi, 2022).

Pemerintah Indonesia mendefinisikan, penduduk usia kerja yakni masyarakat yang memiliki rentang usia 15-65 tahun. Angkatan kerja terdiri dari penduduk berusia 15-65 tahun yang bekerja atau menganggur sementara. Penduduk usia kerja di Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Hal tersebut seperti Tabel bawah ini :

Tabel 1.1 Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, Agustus 2020 - Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Agt 2020-Agt 2021		Perubahan Agt 2021-Agt 2022	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen	juta orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	203,97	206,71	209,42	2,74	1,34	2,71	1,31
Angkatan Kerja	138,22	140,15	143,72	1,93	1,40	3,57	2,55
- Bekerja	128,45	131,05	135,30	2,60	2,02	4,25	3,24
- Pengangguran	9,77	9,10	8,42	-0,67	-6,82	-0,68	-7,43
Bukan Angkatan Kerja	65,75	66,56	65,70	0,81	1,22	-0,86	-1,29
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,77	67,80	68,63	0,03		0,83	
- Laki-Laki	82,41	82,27	83,87	-0,14		1,60	
- Perempuan	53,13	53,34	53,41	0,21		0,07	

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Republik Indonesia (2022)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 209,42 juta penduduk usia kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yakni sebesar 68,63%. Ini menggambarkan perkembangan baik karena jumlah pengangguran semakin menurun setiap tahunnya (Statistik, 2021). Mayoritas penduduk usia kerja berada dalam angkatan kerja dan kelompok ini terus bertambah. Jumlah angkatan kerja terus meningkat beriringan dengan jumlah penduduk usia kerja. Meskipun demikian, terdapat peningkatan pada bukan angkatan kerja sebesar 1,22% pada Agustus 2021.

Setiap tahun angkatan kerja di Indonesia terus bertambah, dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja hal ini tentunya akan berdampak pada perekonomian negara dan kesejahteraan sosial di masa mendatang. Dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, penting untuk diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat mengimbangi antara angkatan kerja yang ada dengan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu tujuan dalam upaya pembangunan. Menciptakan lapangan pekerjaan menjadi tantangan tersendiri bagi strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Persoalan yang selalu dihadapi oleh negara Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan adalah banyaknya tenaga kerja namun tidak tersedia cukup lapangan kerja. Terdapat banyak pengangguran, khususnya pengangguran terbuka sebagai akibat dari terbatasnya kesempatan kerja di setiap sektor yang ada (Carolina, 2018). Meningkatnya jumlah pencari kerja tidak seimbang dengan pergerakan kesempatan kerja ada, ini terjadi dikarenakan prasyarat yang dibutuhkan pada lapangan kerja baru tidak bisa dipenuhi oleh para pencari kerja. Jika negara tidak bisa mengelola para pengangguran dengan baik maka akan menjadi beban bagi negara serta bagi masyarakat luas. Sebaliknya, jika pengangguran dapat dikelola dengan baik maka pengangguran bisa menjadi tenaga kerja yang berkompeten dan produktif sehingga nantinya dapat menjadi aset bangsa yang bernilai tinggi.

Pertumbuhan penduduk pada negara berkembang seperti Indonesia tidak diimbangi dengan kualitas serta produktivitas dari penduduk. Penduduk juga

merupakan tenaga kerja sehingga biasanya mengalami kesulitan dalam penyediaan lapangan kerja. Jika penduduk tidak memiliki pekerjaan maka akan menjadi pengangguran yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini persoalan yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia pada bidang ketenagakerjaan adalah kecilnya kesempatan kerja yang ada namun kelebihan tenaga kerja (Gatiningsih & Sutrisno, 2017). Mengingat kelimpahan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan untuk dapat memperluas kesempatan kerja secara luas.

Masyarakat suatu daerah pastinya ingin memiliki keadaan finansial yang stabil, terutama yang telah memiliki keluarga serta memiliki tanggung jawab untuk membiayai keluarganya. Terdapat beberapa faktor yang bisa menentukan stabilitas finansial, salah satunya yakni kesempatan kerja yang luas dan lapangan kerja yang merata. Pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat dalam hal kesempatan kerja akan berpengaruh pada kestabilan finansial masyarakat. Masyarakat akan mempunyai finansial yang stabil jika penyaluran para pencari kerja dapat dioptimalkan serta tenaga kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar.

Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan, masyarakat menjadi tujuan utama dari pembangunan negara Indonesia serta sumber daya yang paling penting adalah kapasitas manusia. Untuk dapat menciptakan kualitas penduduk yang tinggi, maka harus dilakukan pembangunan berwawasan kependudukan agar dapat meningkatkan kualitas penduduk. Hal ini termasuk kedalam investasi pembangunan jangka panjang yang

bisa dilakukan agar dapat menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik serta dapat memperluas kesempatan kerja (Rusli, 2021). Selanjutnya pada pasal 39 ayat 1 didalamnya dijelaskan pemerintah bertanggung jawab atas upaya untuk perluasan kesempatan kerja baik yang ada di dalam atau di luar hubungan kerja.

Pengangguran menjadi masalah yang seringkali dihadapi negara berkembang seperti Indonesia yang hingga saat ini belum bisa terlepas (Suhandi et al., 2021). Permasalahan pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi masalah aktual. Tujuan dari pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum, ini bertujuan untuk terciptanya stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi agar dapat menekan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia. Jumlah angkatan kerja dan pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap para pencari kerja sehingga menimbulkan pengangguran terbuka.

Menurut Malthus dalam (Alma, 2019), pertumbuhan penduduk mengakibatkan masalah kemiskinan karena laju pertumbuhan penduduk melebihi laju pertumbuhan bahan pangan. Dalam keadaan pertumbuhan penduduk yang cepat maka akan menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Karena jumlah penduduk bertambah lebih cepat dibandingkan perekonomian, upah pekerja menjadi rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Upah pekerja diturunkan karena banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional, pada bulan Agustus tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5,86%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni indikator pengukur jumlah tenaga kerja tidak dapat menemukan pekerjaan atau tidak dapat terserap di pasar kerja.

**Tabel 1.2 Karakteristik Pengangguran (persen),
Agustus 2020-Agustus 2022**

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2020 (persen)	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Perubahan Agt 2020-Agt 2021 (persen poin)	Perubahan Agt 2021-Agt 2022 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,07	6,49	5,86	-0,58	-0,63
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	7,46	6,74	5,93	-0,72	-0,81
- Perempuan	6,46	6,11	5,75	-0,35	-0,36
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	8,98	8,32	7,74	-0,66	-0,58
- Perdesaan	4,71	4,17	3,43	-0,54	-0,74
TPT Menurut Kelompok Umur					
- 15-24 tahun	20,46	19,55	20,63	-0,91	1,08
- 25-59 tahun	5,04	4,44	3,36	-0,60	-1,08
- 60 tahun ke atas	1,70	2,73	2,85	1,03	0,12

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Republik Indonesia (2022)

Data dari BPS Republik Indonesia tahun 2022 tertera bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 yakni sebesar 5,86% angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,63% dibandingkan pada Agustus 2021. Pada Agustus 2022, TPT laki-laki lebih banyak dari perempuan, laki-laki sebesar 5,93% sedangkan perempuan sebesar 5,75%. TPT laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan dari Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2022.

Menurut data yang ada, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Sama halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut jenis kelamin, Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) menurut daerah tempat tinggal juga mengalami penurunan setiap tahunnya dari Agustus 2020 hingga Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan masing- masing sebesar 0,58% dan 0,74%.

Apabila dilihat menurut kelompok umur, usia 15-24 tahun memiliki TPT dengan jumlah terbesar setiap tahunnya. Pada Agustus 2022 TPT usia 15-24 tahun sebesar 20,63%. Urutan kedua yaitu usia 25-59 tahun dengan TPT sebesar 3,36% dan urutan terakhir usia 60 tahun keatas dengan TPT sebesar 2,85%. TPT usia 15-24 tahun mengalami penurunan pada Agustus 2021 yaitu sebesar 0,91% namun pada Agustus 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,08%. Sama halnya dengan TPT usia 25-59 tahun, mengalami penurunan pada Agustus 2021 sebesar 0,60% lalu pada tahun selanjutnya yaitu Agustus 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,08%.

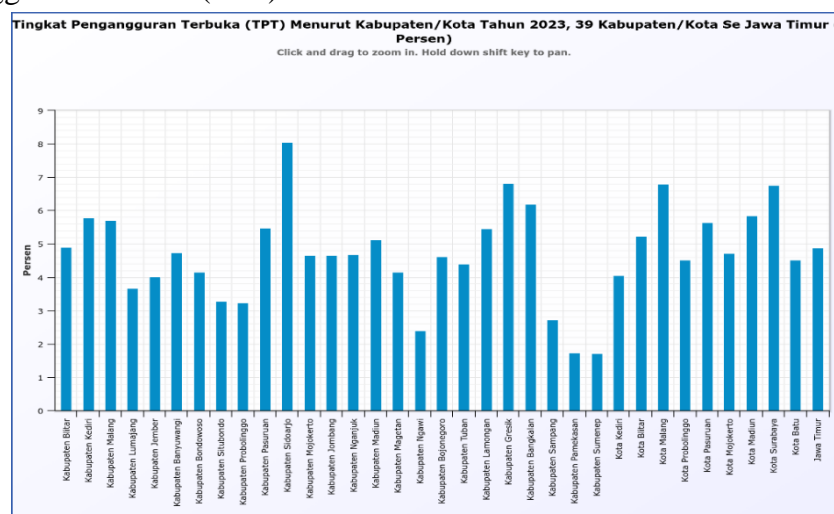
Bedasarkan hasil dari Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa sangat dominan, dengan kata lain pulau jawa memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan pulau lain di Indonesia.

“Dengan memiliki luas sekitar 7% dari total seluruh wilayah Indonesia, Pulau jawa dihuni oleh 56,10% penduduk indonesia atau berjumlah 151,6 juta jiwa”. Hasil Sensus Penduduk 2020; BPS: Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antarpulau. [https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/#:~:text=Dengan%20luas%20sekitar%207%20persen,\(3%2C17%20persen\)](https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/#:~:text=Dengan%20luas%20sekitar%207%20persen,(3%2C17%20persen).). Diakses pada 21 September 2023

Berdasarkan penjelasan tersebut, pulau Jawa menjadi yang paling padat penduduknya di Indonesia, dengan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu contohnya. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur terus bertambah, menjadikannya provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa

Barat (Nabibah & Hanifa, 2022). Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur 2022 (Moshinsky, 2021), di provinsi Jawa Timur masalah pengangguran masih menjadi titik berat pembangunan. Masalah pengangguran yang masih terjadi terlihat dari fenomena penganggur terdidik atau mereka yang berpendidikan tinggi tetapi masih menganggur. Selain itu, kesempatan kerja yang masih sangat terbatas menjadi kendala yang dihadapi Jawa Timur dalam hal ketenagakerjaan.

Masalah pengangguran di Jawa Timur semakin kompleks dikarenakan karakteristik ketenagakerjaan lainnya. Hal ini mencakup perubahan struktur usia penduduk usia kerja, distribusi tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan, dan tingkat upah yang masih di bawah standar minimum yang telah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja juga menyebabkan ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja yang ada dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Berikut yakni tabel yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur 2020-2022:



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur, 2021-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

Dari Gambar tersebut diketahui bahwa Kota Surabaya memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cukup tinggi. Kota Surabaya menduduki 5 teratas dari Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah pengangguran terbuka paling banyak di Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Kota Surabaya menjadi urutan ke 4 dengan TPT paling tinggi di provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya yang disebut kota metropolitan tidak luput dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan pengangguran (Abda & Cahyono, 2022). Namun dalam hal ini Kota Surabaya menunjukkan progres yang baik dari tahun ke tahun karena telah berhasil mengurangi jumlah penganggurannya. Meski begitu, tingkat pengangguran Kota Surabaya masih cukup tinggi mengingat Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Jawa Timur.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, 2020-2023

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa)			
	2023	2022	2021	2020
Kabupaten Pacitan	596 649	592 916	589 108	586 110
Kabupaten Ponorogo	972 582	964 253	955 839	949 318
Kabupaten Trenggalek	744 358	739 669	734 888	731 125
Kabupaten Tulungagung	1 113 973	1 105 337	1 096 588	1 089 775
Kabupaten Blitar	1 249 497	1 240 322	1 231 013	1 223 745
Kabupaten Kediri	1 667 450	1 656 020	1 644 400	1 635 294
Kabupaten Malang	2 703 175	2 685 900	2 668 296	2 654 448
Kabupaten Lumajang	1 147 261	1 137 227	1 127 094	1 119 251
Kabupaten Jember	2 584 771	2 567 718	2 550 360	2 536 729
Kabupaten Banyuwangi	1 744 814	1 731 731	1 718 462	1 708 114
Kabupaten Bondowoso	784 192	781 417	778 525	776 151
Kabupaten Situbondo	694 081	691 260	688 337	685 967
Kabupaten Probolinggo	1 163 859	1 159 965	1 155 894	1 152 537
Kabupaten Pasuruan	1 626 029	1 619 035	1 611 805	1 605 969

Kabupaten Sidoarjo	2 114 588	2 103 401	2 091 930	2 082 801
Kabupaten Mojokerto	1 141 516	1 133 584	1 125 522	1 119 209
Kabupaten Jombang	1 345 886	1 335 972	1 325 914	1 318 062
Kabupaten Nganjuk	1 124 247	1 117 033	1 109 683	1 103 902
Kabupaten Madiun	765 135	757 665	750 143	744 350
Kabupaten Magetan	682 466	678 343	674 133	670 812
Kabupaten Ngawi	881 393	877 432	873 346	870 057
Kabupaten Bojonegoro	1 322 474	1 315 125	1 307 602	1 301 635
Kabupaten Tuban	1 215 795	1 209 543	1 203 127	1 198 012
Kabupaten Lamongan	1 386 941	1 371 509	1 356 027	1 344 165
Kabupaten Gresik	1 344 648	1 332 664	1 320 570	1 311 215
Kabupaten Bangkalan	1 101 556	1 086 620	1 071 712	1 060 377
Kabupaten Sampang	992 210	984 162	976 020	969 694
Kabupaten Pamekasan	862 009	857 818	853 507	850 057
Kabupaten Sumenep	1 143 295	1 136 632	1 12 9822	1 124 436
Kota Kediri	290 836	289 418	287 962	286 796
Kota Blitar	153 541	151 960	150 371	149 149
Kota Malang	847 182	846 126	844 933	843 810
Kota Probolinggo	245 174	243 200	241 202	239 649
Kota Pasuruan	213 450	211 497	209 528	208 006
Kota Mojokerto	135 414	134 350	133 272	132 434
Kota Madiun	201 460	199 192	196 917	195 175
Kota Surabaya	2 893 698	2 887 223	2 880 284	2 874 314
Kota Batu	218 802	216 735	214 653	213 046
Jawa Timur	41 416 407	41 149 974	40 878 789	40 665 696

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

Bedasarkan tabel diatas, kota yang menjadi sorotan pada penelitian ini adalah Kota Surabaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS JawaTimur, 2021), hasil sensus tahun 2020 menunjukkan jumlah masyarakat Kota Surabaya berjumlah 2.874.314 juta jiwa lalu selanjutnya pada tahun 2023 bertambah menjadi sebanyak 2.893.698 juta jiwa. Angka ini merupakan angka tertinggi di Jawa Timur, yang berarti Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk

paling banyak. Dengan banyaknya jumlah penduduk tentu permasalahan ketenagakerjaan menjadi persoalan utama bagi Kota Surabaya.

Tabel 1.4 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Timur, 2022

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten			
Pacitan	673	738	1 411
Ponorogo	1 072	655	1 727
Trenggalek	721	486	1 207
Tulungagung	1 289	994	2 283
Blitar	1 374	1 573	2 947
Kediri	3 865	4 419	8 284
Malang	2 374	2 092	4 466
Lumajang	757	537	1 294
Jember	3 130	1 548	4 678
Banyuwangi	1 414	1 003	2 417
Bondowoso	1 878	1 155	3 033
Situbondo	981	802	1 783
Probolinggo	2 266	1 714	3 980
Pasuruan	2 526	1 875	4 401
Sidoarjo	3 871	4 514	8 385
Mojokerto	3 028	2 413	5 441
Jombang	2 249	1 594	3 843
Nganjuk	1 643	1 167	2 810
Madiun	1 151	991	2 142
Magetan	1 126	2 122	3 248
Ngawi	2 158	1 866	4 024
Bojonegoro	1 652	1 427	3 079
Tuban	1 876	1 538	3 414
Lamongan	2 636	2 309	4 945
Gresik	2 337	1 530	3 867
Bangkalan	1 125	549	1 674
Sampang	515	317	832
Pamekasan	754	657	1 411
Sumenep	929	868	1 797
Kota			
Kediri	625	548	1 173
Blitar	499	410	909
Malang	1 774	1 179	2 953
Probolinggo	349	406	755
Pasuruan	637	560	1 197
Mojokerto	297	266	563

Madiun	462	396	858
Surabaya	7 254	4 867	12 121
Batu	357	398	755
Jawa Timur	63 624	52 483	116 107

Sumber : BPS Kota Surabaya, Data diolah oleh peneliti, 2023

Dilihat pada tabel diatas, Kota Surabaya memiliki jumlah pencari kerja terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Hal ini perlu mendapatkan perhatian bagi pemerintah Kota Surabaya agar para pencari kerja bisa terserap oleh pasar kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kota Surabaya menunjukkan progres yang baik setiap tahunnya, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terus mengalami kenaikan dilengkapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga mengalami penurunan. Namun permasalahan kesempatan kerja dan pengangguran tetap harus ditangani oleh pemerintah Kota Surabaya melalui perantara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya yang memiliki peran utama dalam ketenagakerjaan di Kota Surabaya. Pengangguran terbuka disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja yang cepat namun tidak sesuai dengan pertumbuhan lapangan kerja serta kesempatan kerja yang relatif lambat sehingga menjadi ketidakseimbangan. Hal ini ditunjukkan tabel di bawah ini :

Tabel 1.5 Tingkat Kesempatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2020-2022

Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TPKK) (persen)		
	2022	2021	2020
Tingkat Kesempatan Kerja	92.38	90.32	90.21
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)		
	2022	2021	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69.99	67.30	68.05

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)		
	2022	2021	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka	7.62	9.68	9.79

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya

Perluasan kesempatan kerja di Kota Surabaya perlu untuk terus diupayakan, para pencari kerja memiliki kesempatan sama untuk bisa memperoleh pekerjaan di berbagai sektor yang ada. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berupaya guna menyediakan lowongan pekerjaan di berbagai sektor. Perluasan kesempatan kerja diperlukan karena merupakan upaya untuk terus mengurangi permasalahan pengangguran yang ada di Kota Surabaya. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah program perluasan kesempatan kerja dengan kegiatan bimbingan teknis. Bimbingan teknis dilakukan sebagai upaya dalam memperluas kesempatan kerja, bimbingan teknis ini difokuskan melatih warga Surabaya untuk berwirausaha agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Banyaknya lowongan kerja yang tersedia tidak mampu untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang ada dikarenakan jumlah tenaga kerja terlalu banyak sehingga menjadi tidak seimbang.

Kota Surabaya meraih penghargaan realisasi investasi tertinggi kedua di Indonesia pada tahun 2021. Melalui realisasi investasi akan memungkinkan untuk menciptakan peluang dalam kesempatan kerja serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Surabaya. Investasi yang tinggi memberikan pengaruh positif pada kesempatan kerja. Investasi di berbagai sektor memang diperlukan untuk dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dilansir dari

surabaya.go.id, Bapak Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya mengungkapkan bahwa,

“Dengan investasi yang masuk besar ini, maka saya sampaikan kita harus banyak padat karya yang harus melibatkan orang Surabaya. Sehingga dengan investasi yang besar ini, seharusnya rakyat Surabaya bisa mendapatkan pekerjaan, lalu pengangguran dan kemiskinan harus berkurang” <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65270/surabaya-raih-penghargaan-inves> Diakses pada 21 September 2023

Dalam realisasi investasi Kota Surabaya menunjukkan hasil yang baik dengan memperoleh penghargaan secara langsung dari Presiden Joko Widodo. Meskipun Kota Surabaya memiliki jumlah pencari kerja terbanyak di Provinsi Jawa Timur, namun pemerintah Kota Surabaya berhasil memberikan kesempatan kerja khususnya untuk warga Kota Surabaya. Perluasan kesempatan kerja adalah tanggung jawab dan tugas dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya No 76 Tahun 2021 bahwa bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program kerja, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari paparan sebelumnya, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk memperluas kesempatan kerja di Kota Surabaya. Melihat Kota Surabaya berhasil menunjukkan progres yang baik dalam hal ketenagakerjaan seperti berhasil mengurangi pengangguran terbuka serta meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja setiap tahunnya walaupun dengan jumlah pencari kerja terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya juga meraih penghargaan

realisasi investasi tertinggi kedua di Indonesia pada tahun 2021. Untuk itu perlu bagi masyarakat luas mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan agar bisa mendapatkan hasil yang baik seperti saat ini. Karena alasan inilah penulis berencana untuk meneliti terkait strategi perluasan kesempatan kerja di Kota Surabaya. Selain itu, belum terdapat penelitian yang meneliti mengenai topik ini di Kota Surabaya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan membahas perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam upaya perluasan kesempatan kerja di Kota Surabaya. Dengan Judul **“Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diteliti yakni “Bagaimana Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dalam Memperluas Kesempatan Kerja di Kota Surabaya serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini memiliki manfaat untuk digunakan sebagai bahan bacaan serta referensi di perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berguna untuk penunjang pendidikan.

3. Bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan serta bahan evaluasi terkait perluasan kesempatan kerja di Kota Surabaya.